



**KLIPING DIGITAL
DIREKTORAT JENDERAL
PEMBIAYAAN
INFRASTRUKTUR
PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN**

20 – 21 Maret 2023



KLIPING BERITA DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

21 / 03 / 2023

Analisis Pemberitaan Media Online

NO	ANALISIS		TONE
1	TANGGAL MEDIA JUDUL NARASUMBER RESUME	<p>Senin, 20 Maret 2023</p> <p>https://www.antaranews.com/berita/3449652/pupr-sebut-peningkatan-akses-air-bersih-butuh-inovasi-pembiayaan</p> <p>PUPR sebut peningkatan akses air bersih butuh inovasi pembiayaan</p> <p>Direktur Jendereal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Herry Trisaputra Zuna</p> <p>Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyebutkan peningkatan akses air bersih untuk masyarakat khususnya dengan sistem perpisahan membutuhkan inovasi pembiayaan dengan pihak swasta hingga tak hanya mengandalkan anggaran pemerintah. Direktur Jendereal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Herry Trisaputra Zuna mengatakan pembangunan penyaluran air bersih dengan sistem pipa itu memerlukan biaya yang tidak sedikit. Sehingga seluruh pihak perlu menemukan formula terbaik karena air merupakan sumber kehidupan masyarakat. Menurut dia, sejauh ini tingkat akses air bersih dengan sistem perpipaan baru mencakup masyarakat sekitar 20,6 persen. Sehingga masih ada sekitar 80 persen yang masih bisa dieksplorasi untuk mencari formula pembiayaan itu.</p>	+
2	TANGGAL MEDIA JUDUL NARASUMBER	<p>Senin, 20 Maret 2023</p> <p>https://bisnis.tempo.co/read/1704906/kementerian-pupr-sebut-pembangunan-infrastruktur-di-sektor-air-butuh-peran-swasta</p> <p>Kementerian PUPR Sebut Pembangunan Infrastruktur di Sektor Air Butuh Peran Swasta</p> <p>Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian PUPR Herry Trisaputra Zuna mengatakan,</p>	+



KLIPING BERITA DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

21 / 03 / 2023

Analisis Pemberitaan Media Online

	RESUME	Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian PUPR Herry Trisaputra Zuna mengatakan, pembiayaan infrastruktur sektor air selama ini banyak bergantung pada pembiayaan pemerintah. Herry mengatakan, kendala pelibatan swasta dalam membangun infrastruktur publik umumnya pada kepastian rencana bisnis yang ditawarkan.	
3	TANGGAL MEDIA JUDUL NARASUMBER RESUME	Senin, 20 Maret 2023 https://www.detik.com/jabar/berita/d-6628544/pemerintah-racik-skema-untuk-penuhi-kebutuhan-air-bersih Pemerintah Racik Skema untuk Penuhi Kebutuhan Air Bersih Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur PUPR Herry Trisaputra Zuna Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan (DJPI) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR), meracik formula dalam pembangunan infrastruktur pemenuhan kebutuhan air melalui 'Blended Finance for Water Sector'. Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur PUPR Herry Trisaputra Zuna mengatakan pemerintah bersama pihak lainnya berinovasi dalam pembiayaan pembangunan untuk pemenuhan kebutuhan air bagi masyarakat.	+
4	TANGGAL MEDIA JUDUL NARASUMBER	Selasa, 21 Maret 2023 https://www.viva.co.id/berita/bisnis/1585698-kementerian-pupr-ungkap-tantangan-utama-tarik-minat-investasi-infrastruktur-air-bersih?page=all Kementerian PUPR Ungkap Tantangan Utama Tarik Minat Investasi Infrastruktur Air Bersih Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, Kementerian PUPR, Herry Trisaputra Zuna	+



KLIPING BERITA DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

21 / 03 / 2023

| Analisis Pemberitaan Media Online

	RESUME	Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, Kementerian PUPR, Herry Trisaputra Zuna menilai, infrastruktur sektor air sangat bergantung pada APBN dan menghadapi tantangan dalam mendapatkan pendanaan dari sektor swasta. Hal ini dikarenakan proyek infrastruktur sektor air membutuhkan investasi yang sangat besar dan tidak sebanding dengan revenue yang dihasilkan.	
--	---------------	---	--



20 / 03 / 2023

Sumber: antaranews.com

PUPR sebut peningkatan akses air bersih butuh inovasi pembiayaan

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Ahmad Buchori

Bandung (ANTARA) – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyebutkan peningkatan akses air bersih untuk masyarakat khususnya dengan sistem perpisahan membutuhkan inovasi pembiayaan dengan pihak swasta hingga tak hanya mengandalkan anggaran pemerintah.

Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Herry Trisaputra Zuna mengatakan pembangunan penyaluran air bersih dengan sistem pipa itu memerlukan biaya yang tidak sedikit. Sehingga seluruh pihak perlu menemukan formula terbaik karena air merupakan sumber kehidupan masyarakat.

“Di sini kita perlu membuat skema pembiayaan yang terjangkau bagi masyarakat, tapi tetap menarik bagi swasta,” kata Herry saat kegiatan workshop rangkaian Worl Water Forum di Institut Teknologi Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat, Senin.

Menurut dia, sejauh ini tingkat akses air bersih dengan sistem perpipaan baru mencakup masyarakat sekitar 20,6 persen. Sehingga masih ada sekitar 80 persen yang masih bisa dieksplorasi untuk mencari formula pembiayaan itu.

“Sebagai ilustrasi, di RPJMN kita untuk meningkatkan dari 20 ke 30 persen itu

membutuhkan dana sebesar Rp123,4 triliun dalam lima tahun, jadi kalau 80 persen ya Rp1.000-an triliun lenih,” katanya.

Dia menilai, permasalahan skema pembiayaan dengan pihak swasta itu yakni soaln kepastian pendapatan. Sehingga pihaknya perlu menyediakan perencanaan bisnis yang pasti.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Jawa Barat Setiawan Wangsaatmaja mengatakan Provinsi Jawa Barat sudah memiliki empat Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) yang bisa menjadi formulasi soal pembiayaan penyediaan air bersih.

Salah satunya, kata dia, penyediaan air bersih yang bersumber dari Bendungan Jatigede, Kabupaten Sumedang, untuk kebutuhan air bagi wilayah Cirebon Raya.

“Jadi kita juga bisa mengejar ketinggalannya, karena masalah isu air bersih ini dibahas bukan hanya setingkat Pemerintah Provinsi saja, melainkan di tingkat dunia,” kata Setiawan.

Sejauh ini, menurut dia, akses masyarakat untuk menggunakan air bersih di wilayah Jawa Barat sudah baik. Namun untuk air dengan sistem perpipaan masih banyak yang harus dikejar.

“Saya melihat sampai 2035 di Jawa Barat sendiri kita butuh investasi sekitar Rp20



KLIPING BERITA DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

20 / 03 / 2023

| Sumber: antaranews.com

triliun. Nah oleh karena itu bahwa betul-betul blended financial (inovasi pembiayaan) ini menjadi andalan kita,” katanya

<https://www.antaranews.com/berita/3449652/pupr-sebut-peningkatan-akses-air-bersih-butuh-inovasi-pembiayaan>



20 / 03 / 2023

Sumber: tempo.co

Kementerian PUPR Sebut Pembangunan Infrastruktur di Sektor Air Butuh Peran Swasta

Reporter: Ahmad Fikri

Editor: Grace Gandhi

TEMPO.CO, Bandung - Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian **PUPR** Herry Trisaputra Zuna mengatakan, pembiayaan infrastruktur sektor air selama ini banyak bergantung pada pembiayaan pemerintah.

“Padahal sektor pemerintah, *state budget* itu hanya bisa menampung (membiayai) kurang lebih 30-37 persen. Sehingga kalau kita mau mengejar target SDGs tahun 2030 kita harus mengundang pihak swasta. Di sinilah kita perlu membuat skema pembiayaan sedemikian rupa yang terjangkau bagi masyarakat, tapi juga menarik bagi swasta,” kata Herry selepas membuka *workshop “Blended Finance for Water Sector”* di ITB, Bandung, Senin, 20 Maret 2023.

Herry mengatakan, masalah pembiayaan tersebut menjadi perhatian dunia. *Workshop* yang berlangsung di ITB tersebut menjadi rangkaian *side event* menjelang 10th World Water Forum yang akan berlangsung pada Mei 2024 di Bali. Indonesia ditunjuk menjadi tuan rumah.

“Topik hari ini akan membahas *blended finance* untuk sektor air. *Blended finance* itu bagaimana kita mengombinasikan *resources*, *resources* itu ada yang mahal, ada yang murah, ada yang gratis,” kata Herry.

Herry mengatakan, hasil *workshop* tersebut diharapkan bisa mendapati formula skema pembiayaan yang terbaik. “Diharapkan nanti dari sini kita bisa memformulasikan skema yang paling baik itu seperti apa,” kata dia.

Herry mencontohkan kebutuhan **infrastruktur** sektor air Indonesia. “Yang perpipaan saja baru 20 persen, artinya kita masih ada potensi peluang mengekspansi yang 80 persen. Sebagai ilustrasi, RPJMN untuk meningkatkan 20 persen jadi 30 persen itu butuh dana Rp 123,4 triliun dalam 5 tahun. Kalau 80 persen itu seribuan triliun lebih, jadi potensinya luar biasa. Makanya hari ini kita coba diskusikan format seperti apa sehingga swasta bisa masuk, tapi tetap airnya *affordable* buat masyarakat karena air itu masalah semua orang,” kata dia.

Herry mengatakan, kendala pelibatan swasta dalam membangun infrastruktur publik umumnya pada kepastian rencana bisnis yang ditawarkan. “Swasta itu yang dibutuhkan kepastian. Nah ini yang harus disediakan untuk bisa membuat *business plan* yang pasti, berarti harus ada kepastian pendapatan, karena biaya dilakukan di depan dan akan dikembalikan dalam waktu 20-30 tahun,” kata dia.

Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Setiawan Wangsaatmaja membenarkan soal pembiayaan yang selama ini menjadi kendala dalam membangun infrastruktur



20 / 03 / 2023

Sumber: tempo.co

publik di sektor air. “Itu memang kami rasakan betul. Ketika pemerintah hanya mengandalkan uang pemerintah saja untuk mengekspansi atau untuk mengejar akses terhadap perpipaan saja masih jauh. Kemampuan dari pemerintah dan pemerintah daerah barangkali hanya 20-30 persen,” kata dia.

Setiawan mengatakan, Jawa Barat saat ini tengah menggarap empat proyek terkait penyediaan air baku dengan melibatkan swasta. Skema yang digunakan tersebut misalnya KPBU atau PPP, *Unsolicited PPP*, serta *Busssines to Bussiness* (B to B). Misalnya proyek SPAM Jatigede untuk penyediaan air baku Cirebon Raya yang pembiayaannya menggunakan skema KPBU, serta akses pipa ari baku Bandung Selatan.

“Di Bandung Selatan itu posisinya menunggu *approval* terkait dengan tarif. Karena kami bekerja sama dengan Kementerian Keuangan melalui PT SMI untuk penentuan tarifnya,” kata dia.

Setiawan mengatakan, *blended finance* menjadi strategis untuk mengejar target pembangunan. Jawa Barat sendiri membutuhkan sekitar Rp 20 triliun sampai dengan 2035. Oleh karena itu, *blended finance* ini menjadi andalan kalau mau mengejar pemenuhan akses terhadap perpipaan.

Direktur Utama PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII) Muhammad Wahid Sutopo mengatakan, PII menjadi *special mission vehicle* milik Kementerian Keuangan untuk mendorong pembiayaan swasta memasuki sektor publik. “Kami secara umum mendukung upaya-upaya untuk mempercepat

pengembangan infrastruktur untuk pemenuhan kebutuhan air di seluruh Indonesia,” kata dia.

Wahid mengatakan, PII saat ini terlibat dalam enam proyek infrastruktur lewat dua fasilitas pembiayaan yang disediakan pemerintah. Dia tidak merinci proyek tersebut. Skema yang dimandatkan pada perusahaan adalah skema **penjaminan** pemerintah dan skema *Project Development Facility*. Dengan harapan, dapat mengundang minat dan partisipasi dari pihak-pihak swasta untuk lebih berperan dalam pengembangan infrastruktur air bersih.

Rektor ITB Reini Wirahadikusumah mengatakan, pendanaan infrastruktur membutuhkan inovasi. “Jadi pemerintah harus berinovasi. Tugas perguruan tinggi itu membantu berpikir dan juga memberikan validasi terhadap pemikiran-pemikiran kemudian menyuarakan juga pemikiran-pemikiran itu secara obyektif sehingga membantu masyarakat untuk mengerti,” kata dia.

Reini mengatakan, masalah yang dihadapi dalam membangun publik infrastruktur itu bukan hal teknis. Publik infrastruktur itu masalah teknisnya hanya 10 persen. Kalau membangun bendung, air bersih, dan sebagainya, ITB bisa semua. Tapi yang sulit itu adalah masalah non-teknis. Sementara 90 persen publik infrastruktur itu masalahnya non-teknis. Non-teknis itu adalah uang. Uang itu juga tidak cukup, harus ada dukungan masyarakat, di samping juga ada masalah sosial dan lingkungan.

Vice Chairman of Program and Session 10th World Water Forum 2024



KLIPING BERITA DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

20 / 03 / 2023

| Sumber: tempo.co

Arie Setiadi mengatakan, kegiatan yang dilakukan di ITB tersebut juga akan dilangsungkan di sejumlah perguruan tinggi lainnya. Level pembahasan kemudian akan meningkat ke level wilayah, hingga kebijakan.

Menurut dia, Indonesia sebagai penyelenggara berharap bisa menghasilkan sesuatu karena air itu adalah *everibody*

bussiness. Masalah yang disampaikan tadi bukan hanya dihadapi Indonesia, tapi secara global. "Mudah-mudahan kita bisa menghasilkan sesuatu yang bisa disepakati di level dunia," kata Arie.

<https://bisnis.tempo.co/read/1704906/kementerian-pupr-sebut-pembangunan-infrastruktur-di-sektor-air-butuh-peran-swasta>



20 / 03 / 2023

Sumber: detik.com

Pemerintah Racik Skema untuk Penuhi Kebutuhan Air Bersih

Author: Sudirman Wamad

Bandung - Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan (DJPI) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR), meracik formula dalam pembangunan infrastruktur pemenuhan kebutuhan air melalui 'Blended Finance for Water Sector'.

Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur PUPR Herry Trisaputra Zuna mengatakan seminar Blended Finance for Water Sector merupakan rangkaian dari World Water Forum 2024. Herry mengatakan pemerintah bersama pihak lainnya berinovasi dalam pembiayaan pembangunan untuk pemenuhan kebutuhan air bagi masyarakat. Sebab, lanjut Herry, selama ini pembiayaan air itu bergantung pada publik atau pemerintah.

"Padahal sektor pemerintah hanya bisa menampung kurang lebih 30 sampai 37 persen, mengejar target Sustainable Development Goals (SDGs) tahun 2030. Kita harus bisa mengundang pihak swasta, kita perlu membuat skema pembiayaan berbagai rupa," kata Herry saat acara Water Innovative Finance di ITB, Senin (20/3/2023).

Herry tak menampik dalam sektor pembangunan sistem perpipaan di Indonesia baru 20 persen. Ia menyebut masih ada potensi sebesar 80 persen untuk mengembangkan sektor. Namun, perlu adanya formula agar pihak swasta bisa

tertarik dan terlibat dalam pembangunan ini.

"Sebagai ilustrasi, RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Negara) kita untuk ditingkatkan dari 20 persen itu menjadi 30 persen butuh dana Rp 123,4 triliun lima tahun. Kalau 80 persen, berarti seribuan lebih (triliun). Format seperti apa swasta bisa masuk, airnya bisa dimanfaatkan masyarakat," kata Herry.

"Swasta itu butuh kepastian, ini harus kita sediakan untuk bisa membuat bisnis plan yang pasti, harus ada kepastian pendapatan. Biaya yang dikeluarkan di depan itu bisa dikembalikan dalam 20 sampai 30 tahun, ini harus kita bentuk," ucap Herry menambahkan.

Sementara itu, Sekda Jabar Setiawan Wangsaatmaja mengatakan saat ini ada empat proyek pembangunan infrastruktur di sektor air yang menggunakan skema blended finance for water sector. Seperti pembangunan Jatigede, SPAM Regional Sinumbra dan di Kertasari.

"Sistem Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) sudah dilakukan, misalnya di Jatigede untuk Cirebon Raya. Menunggu approval terkait tarif," kata Setiawan.

"Kemudian, unsolicited public private partnership (PPP) di Sinumbra untuk pemenuhan (air) Bandung Selatan. Feasibility study sudah, tinggal tunggu



KLIPING BERITA DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

20 / 03 / 2023

| Sumber: detik.com

lelang," ucap Setiawan menambahkan.
<https://www.detik.com/jabar/berita/d->

[6628544/pemerintah-racik-skema-untuk-penuhi-kebutuhan-air-bersih](https://www.detik.com/jabar/berita/d-6628544/pemerintah-racik-skema-untuk-penuhi-kebutuhan-air-bersih)



21 / 03 / 2023

Sumber: viva.co.id

Kementerian PUPR Ungkap Tantangan Utama Tarik Minat Investasi Infrastruktur Air Bersih

Oleh : Raden Jihad Akbar, Adi Suparman

VIVA Bisnis – Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, Kementerian PUPR, Herry Trisaputra Zuna menilai, infrastruktur sektor air sangat bergantung pada APBN dan menghadapi tantangan dalam mendapatkan pendanaan dari sektor swasta.

Hal ini dikarenakan proyek infrastruktur sektor air membutuhkan investasi yang sangat besar dan tidak sebanding dengan revenue yang dihasilkan.

"Innovative water financing menjadi isu mendasar untuk menjamin ketersediaan air dan mencapai target SDG. Pendekatan bisnis seperti biasanya harus ditinggalkan dan stakeholder utama harus bekerjasama untuk meningkatkan investasi di Sektor Air," ujar Herry disela Workshop Water Innovative Finance 'Blended Finance for Water Sector' di Aula Barat Institut Teknologi Bandung (ITB), Senin, 20 Maret 2023.

Berdasarkan hal tersebut, ada kebutuhan yang mendesak untuk mencari mekanisme financing delivery yang tepat untuk Sektor Air dalam mempercepat pembangunan. Salah satu modelnya adalah blended finance untuk penyediaan infrastruktur sektor air.

"Bagaimana kita mengkombinasikan segala resources, pembiayaan itu ada yang mahal, ada yang murah, selama ini pembiayaan itu

selalu bergantung kepada publik, padahal sektor pemerintah itu hanya bisa menampung kurang lebih 37 persen," terangnya.

"Sehingga kalau mau mengejar target, kita harus mengundang pihak swasta. Nah di sinilah perlu membuat skema pembiayaan yang terjangkau bagi masyarakat tapi tetap menarik untuk swasta. Jadi dikombinasikan dengan segala sumber yang ada," tambahnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Setiawan Wangsaatmaja menambahkan, kolaborasi Pemerintah dengan swasta untuk pemenuhan hal air bersih bagi masyarakat sangat diperlukan bagi Pemerintah Daerah.

"Memang kita rasakan betul, ketika mengandalkan Pemerintah saja untuk ekspansi atau pemenuhan air bersih, apalagi kita mengejar akses perpipaan, kita masih jauh karena kemampuan Pemerintah Daerah sampai 30 persen," terangnya.

"Di Jawa Barat sudah mengembangkan, KPBU yang sudah kita lakukan ada Jatigede, kita bekerjasama sama dengan Kementerian Keuangan," tambahnya.

<https://www.viva.co.id/berita/bisnis/1585698-kementerian-pupr-ungkap-tantangan-utama-tarik-minat-investasi-infrastruktur-air-bersih?page=all>